

KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI: ANALISIS EKOLOGI POLITIK

Natural Resource Conservation in Gunung Merapi National Park: A Political Ecology Analysis

Elisabet Repelita Kuswijayanti¹, Arya Hadi Dharmawan², Hariadi Kartodihardjo³

¹ Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

² Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi dan Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

³ Departemen Manajemen Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

Abstract

Gunung Merapi is one of the mountain ecosystem in the center of Java island. The ecosystem is located under the administration of Yogyakarta Special Province and Center of Java Province. Since May 4th, 2004, the ecosystem has been appointed as Gunung Merapi National Park under the decree of Minister of Forestry Number 134/2004. Polemic over the appointment has been emerged before the decree issued and still continuing after. This research has been conducted in 1) Ngargomulyo village, Dukun, Magelang, Center of Java Province, 2) Jurangjero sand mining area in Ngargosoka, Srumbung, Magelang, Center of Java Province and 3) Kaliurang tourism destination area in Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta Special Province on Juli 2005 and Juni-Juli 2006. This research aimed to 1) mapping natural resources right and access mechanism and 2) analyse conflict between Environmental Non-Government Organisations (ENGOS) and Government. Using political ecology analysis, the research shows that the appointment of Gunung Merapi National Park only benefiting them living in tourism destination and sand mining area, but giving uncertainty for them living in village as a farmer. The research also identified that the conflict between government and ENGOS is the conflict of conservation discourses. The strategy for the future development of Gunung Merapi National Park is suggested as follows: 1) government should understand the natural resource access mechanism which has been worked in the Merapi ecosystem and 2) government should work together with the grassroots organisation to implement policy in the field level and with the ENGOS to develop natural resources conservation discourses.

Key words: national park, access, conflict, political ecology, conservation discourses

Pendahuluan

Kawasan hutan Gunung Merapi merupakan salah satu ekosistem pegunungan di Pulau Jawa bagian tengah. Secara administratif kawasan ini terletak di dua propinsi yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan kawasan Merapi terbagi menjadi beberapa fungsi konservasi sebagai Hutan Lindung, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan konservasi ini, pemerintah menggagas perubahan status kawasan menjadi taman nasional pada tahun 2001. Gagasan perubahan ini menimbulkan polemik. Di tengah suasana pro-kontra, pemerintah mengeluarkan SK Menhut No. 134/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas ± 6410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Propinsi DIY menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Sebanyak 26 Organisasi non-pemerintah di bidang Lingkungan (Ornop-L) dan Organisasi akar rumput di kawasan Merapi

menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap TNGM melalui Aliansi Masyarakat Peduli Merapi (AMPM) dan mendesak agar pemerintah mencabut kembali SK penetapan tersebut dengan alasan mengabaikan partisipasi masyarakat. Upaya hukum yang ditempuh Walhi gagal. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta tanggal 24 Januari 2005 dimenangkan oleh pemerintah. Proses persiapan menjadi TNGM selanjutnya terus dilakukan pemerintah. Sementara itu, Ornop-L yang masih kontra TNGM terus melakukan upaya penguatan jaringan. Suasana pro-kontra yang tak berkesudahan ini akan mempengaruhi upaya konservasi di kawasan Merapi. Penetapan kawasan konservasi Merapi menjadi TNGM berarti mengubah perolehan mekanisme akses dan hak terhadap sumberdaya alam di sana. Perubahan inilah yang memicu konflik pro-kontra TNGM. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan mekanisme akses dan hak atas sumberdaya alam sebelum dan sesudah penetapan TNGM.

2. Menganalisis konflik kepentingan dan relasi kekuasaan para aktor dalam konservasi sumberdaya alam di TNGM.

Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga kawasan studi yang merupakan kawasan penyangga TNGM, yaitu (1) kawasan pemukiman penduduk di Desa Ngargomulyo, (2) kawasan penambangan pasir S. Putih, Dusun Jurangjero, Desa Ngargosoka, dan (3) kawasan wisata Kaliurang di desa Hargobinangun (Gambar 1). Pemilihan ketiga kawasan tersebut dengan alasan ketiganya mewakili karakteristik utama interaksi manusia dengan alam di lereng Merapi, yaitu pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Waktu penelitian adalah pada Juli 2005 dan Juni-Juli 2006.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penekanan pada penggambaran, pemahaman, dan menjelaskan fenomena yang kompleks pada hubungan, pola-pola dan konfigurasi antar faktor dengan menggunakan analisis ekologi politik. Menurut Bryant dan Bailey (2000), ekologi politik digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sumber-sumber politik, situasi, dan perubahan lingkungan yang beragam. Dalam terminologi ini, penyelidikan secara langsung dibalik dan ditempatkan pada konsekuensi yang terjadi pada lingkungan fisik sebagai hasil dari keputusan politik. Ekologi politik juga digunakan untuk memahami bagaimana interaksi manusia dan lingkungan terkait dengan degradasi lingkungan, politik ditempatkan sebagai subyek utama penelitian ekologi politik, dengan menganalisa hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam penetapan kebijakan terhadap suatu lingkungan yang telah terpolitisir.

Secara keseluruhan validasi penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu penelusuran data/informasi dari tiga sisi antara lain: *pertama*, dari hasil perolehan data primer hasil observasi lapangan atau dari obyek penelitian secara langsung; *kedua*, dari data sekunder yang diperoleh dari studi literatur untuk memperkaya dimensi data; dan *ketiga* dari analisis data yang dilakukan secara subyektif oleh peneliti berdasarkan metode analisis data yang telah dipilih. Dengan memadukan sedikitnya tiga metode misalnya pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen, maka satu dan lain metode akan saling menutup kelemahan sehingga tangkapan atas realitas sosial menjadi lebih valid (Sitorus 1998). Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi serta catatan harian. Metode pencarian responden menggunakan metode *snowball*, yaitu perolehan responden berikutnya berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Analisis data menggunakan perspektif teori konflik¹ dari Fisher *et al.* (2000) dan teori akses² dari Ribot dan Peluso (2003).

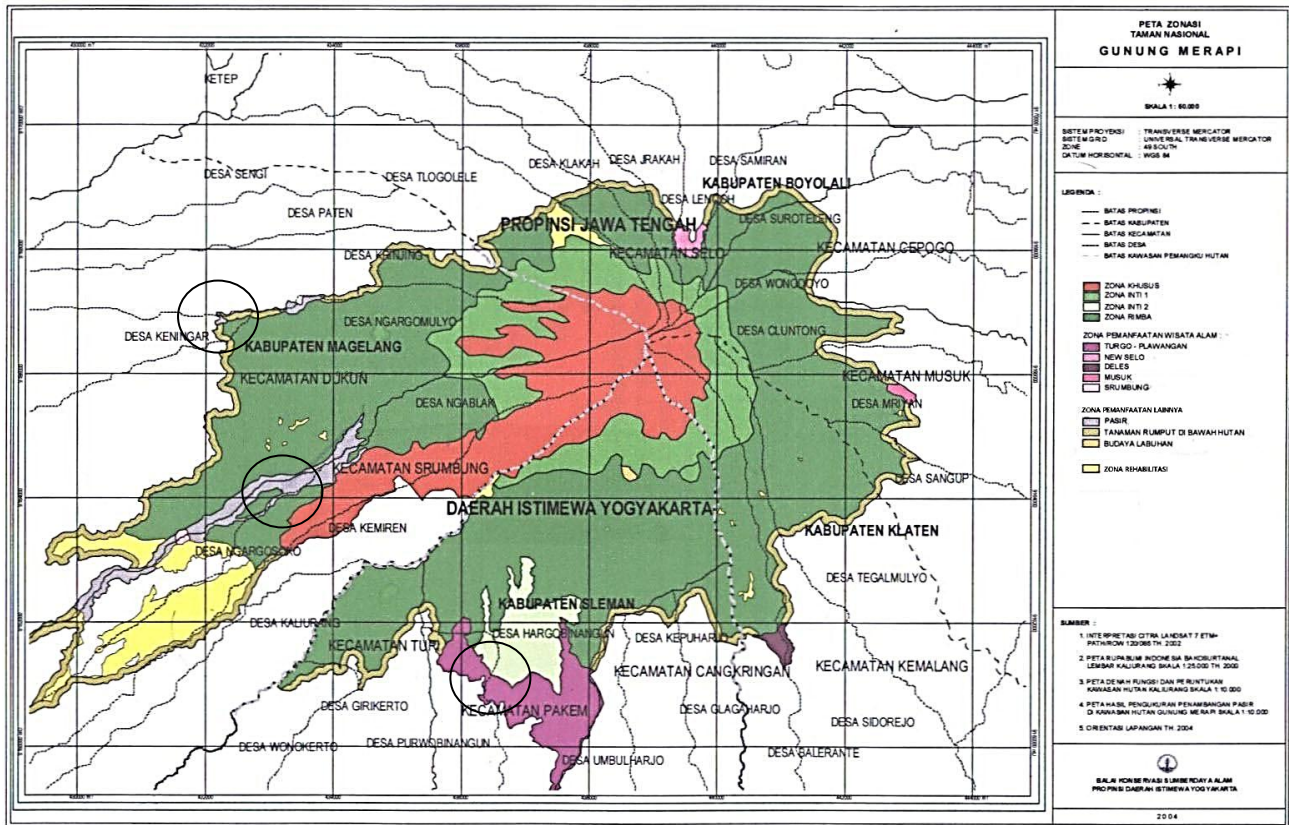
¹ Konflik menurut Fisher dkk (2000) adalah hubungan antar dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik wilayah penelitian. Hasil pengamatan terhadap karakteristik ekologi politik di tiga kawasan studi sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 memperlihatkan bagaimana alam di lereng Merapi dikonstruksi. Pada kawasan pemukiman penduduk Ngargomulyo terlihat bahwa pengelolaan alam dikerjakan oleh penduduk sendiri. Secara turun temurun, penduduk membentuk alam melalui kegiatan budidaya pertanian. Pada kawasan S. Putih, Jurangjero, Ngargosoka, terlihat adanya campurtangan para pengusaha tambang pasir untuk mengeksploitasi alam. Mereka adalah para pemilik modal (kapital) yang menggunakan peralatan untuk menambang pasir. Campurtangan para pemilik modal dalam pengelolaan alam ini juga terlihat pada kawasan wisata Kaliurang, Hargobinangun. Di kawasan ini para pemilik modal membangun berbagai fasilitas untuk menunjang kawasan wisata seperti penginapan, rumah makan, kolam renang, lapangan golf, taman bermain, dan sebagainya. Pengamatan terhadap karakteristik wilayah ini menghasilkan dua tatanan pengaturan alam yaitu rezim organik alam untuk Ngargomulyo, rezim kapitalis alam untuk Ngargosoka, dan Hargobinangun³.

² Akses menurut Peluso dan Ribot (2003) adalah kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu –termasuk di antaranya dari obyek material, orang lain, lembaga dan simbol.

³ Berdasar penelitiannya di hutan Pasifik Colombia, Arturo Escobar (1999) mengidentifikasi adanya 3 rezim alam berdasarkan pada cara bagaimana alam itu dikonstruksi oleh manusia. Ketiga rezim itu adalah 1) rezim organik alam dimana manusia mengkonstruksi alam melalui tradisi budaya yang telah dibangun secara turun temurun, 2) rezim kapitalis alam dimana konstruksi alam dilakukan oleh para pemilik modal (kapitalis), dan 3) rezim tekno alam dimana peran bioteknologi mampu mengubah alam menjadi bentukan artificial.



Gambar 1. Lokasi Penelitian. Sumber: BKSDA DIY (2005)

Tabel 1. Karakteristik Wilayah Penelitian

Faktor pembeda	Pemukiman Penduduk Ngargomulyo	Penambangan Pasir S. Putih, Jurangjero, Ngargosoka	Kawasan Wisata Kaliurang, Hargobinangun
Administratif	Kec. Dukun, Magelang, Jateng	Kec. Srumbung, Magelang, Jateng	Kec. Pakem, Sleman, DIY
Geografis	872 m dpl	1070 m dpl	900 m dpl
Matapencarian yg dominan	Petani-peternak	Buruh <i>coker/ Penylenggrong</i>	Penjual jasa wisata
SDA yg diakses dr hutan lindung	Rumput, <i>rencek</i> , air, lahan	Pasir batu	Jasa lingkungan
Organisasi non-pemerintah yg dominan	GMCA Pasag Merapi Kappala Indonesia	Goro	Yawama Pasag Merapi Kappala Indonesia
Organisasi pemerintah yg dominan	Perhutani	Perhutani Pemda Magelang	Dishutbun DIY BKSDA DIY Pemda Sleman
Swasta	-	Penambang pasir yg memiliki surat izin	PD Anindya

Keterangan:

rencek = ranting kering untuk kayu bakar

buruh *coker/penylenggrong* = penambang pasir manual, sebagai buruh tugasnya menaikkan pasir ke truk jika bekerja secara mandiri mereka mengumpulkan pasir untuk dijual ke siapa saja yang datang.

Analisis akses dan hak terhadap sumberdaya alam di tiga kawasan studi Dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana para aktor mengakses sumberdaya alam sebelum penetapan TNGM dan setelah penetapan TNGM. Hasil analisis akses dan hak di tiga kawasan studi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kawasan pemukiman penduduk Ngargomulyo

Aktor di kawasan ini adalah penduduk Ngargomulyo dan Perhutani sebagai pengelola hutan lindung. Selama bertahun-tahun penduduk yang mayoritas pencahariannya adalah petani dan peternak mampu mengakses hutan lindung tanpa kesulitan. *Ngarit* atau mencari rumput adalah ritual keseharian penduduk peternak sapi di Ngargomulyo. Mencari *rencek* atau ranting kering

untuk kayu bakar adalah bagian lain dari keseharian kegiatan penduduk. Di kawasan ini banyak dijumpai petani yang melakukan budidaya di hutan lindung. Tidak jelas siapa yang memulai namun kegiatan ini dengan cepat menular karena lahan di hutan lebih subur. Kegiatan ini diawali karena melihat lahan bekas kebakaran yang telantar. Rata-rata penduduk mampu *bubak* (membuka lahan) hingga seluas 5 *kesok* (1 kesok = 800 m²). Untuk sekali masa tanam dibutuhkan modal minimal Rp10.000.000,00. Mekanisme *bubak* di hutan lindung dimulai dengan meminta izin secara lesan kepada mandor Perhutani. Persyaratan dari mandor cukup dengan bertanam akasia di sepanjang pinggir lahan. Hasil panen pun tidak selalu harus dibagi dengan mandor. Bagi Perhutani, kegiatan ini lebih baik dibandingkan dengan kegiatan penambangan yang memiliki dampak lebih besar. Kegiatan budidaya ini juga dianggap mampu menggantikan rehabilitasi lahan di bekas kebakaran selagi Perhutani belum ada dana. Perubahan fungsi kawasan menjadi TNGM meresahkan petani hutan lindung. Untuk menambah penghasilan, mereka menganyam *kepeng* (anyaman bambu untuk menjemur padi) yang bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Harga satu kepeng sekitar Rp 20.000,00 – Rp 25.000,00. Bahan baku bambu ini juga diperoleh dari hutan lindung.

2. Kawasan pertambangan pasir Sungai Putih, Dusun Jurangjero, Desa Ngargosoka

Aktor utama di kawasan ini adalah Goro (Paguyuban Gotong Royong). Goro adalah organisasi para buruh *coker/penylenggrong* (penambang pasir manual) yang bertugas menaikkan pasir ke truk atau pencari pasir untuk dijual kepada siapa saja yang berminat. Anggotanya berjumlah 3500 orang tersebar di Kecamatan Srumbung dan Salam. Setiap truk pasir yang melintas harus berhenti di salah satu gardu Goro. Masing-masing gardu menyediakan beberapa buruh penylenggrong yang kemudian menjadi langganan. Harga buruh disepakati di gardu ini. Goro mengandalkan pada kekuatan fisik untuk mendapatkan harga yang dirasa sesuai. Biasanya sekitar Rp15.000,00 per orang. Satu truk biasanya membutuhkan tenaga 4-5 orang tergantung besar kecilnya truk. Untuk layanan penyediaan tenaga ini, pengemudi truk membayar Rp 2.000,00 kepada Goro. Pemasukan perhari Goro dari penarikan ongkos langganan buruh bisa ratusan ribu rupiah. Untuk memelihara hubungan anggota, setiap tahun sekali Goro memberikan fasilitas asuransi kecelakaan kerja di lokasi tambang, membantu

kelahiran, dan memberikan paket lebaran. Setiap bulannya, Goro memberikan subsidi beras masing-masing sebanyak 5 kg untuk 562 keluarga anggota Goro yang dikategorikan tidak mampu. Perubahan status kawasan hutan lindung menjadi TNGM tidak terlalu meresahkan karena S. Putih termasuk dalam bagian zonasi pemanfaatan tambang.

3. Dampak ekonomi penambangan pasir

Penambangan pasir batu sebenarnya hanya memberikan kontribusi 2% bagi pendapatan Pemda Magelang. Meski nilainya kecil, sektor ini signifikan. Potensi pasir dan batu produk Gunung Merapi merupakan bahan galian andalan dari Kabupaten Magelang yang telah terbukti bernilai di pasaran, baik di dalam Kabupaten Magelang maupun Propinsi Jawa Tengah dan DIY (Dinas Pertamben, Magelang 2006). Sektor pertambangan pasir memberikan pendapatan bagi Pemda Magelang antara lain: *pertama*, penarikan Retribusi Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sebesar Rp 150.000,00 untuk tiap penambang baik perorangan maupun Badan Usaha. Besarnya retribusi yang dibayar tergantung pada jenis SIPD yang dimohon yang terdiri dari unsur luasan lahan tambang, jenis peralatan yang digunakan, dan waktu menambang yang dipilih. SIPD berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan bisa diperpanjang dua kali, tiap satu kali perpanjangan berlaku satu tahun. Penarikan biaya Reklamasi ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,00 per ha (Perda No.23/2001). Penarikan retribusi dan biaya reklamasi ini dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi. *Kedua*, pendapatan yang diperoleh melalui penarikan Pajak yang dikelola oleh BPKKD. Pendapatan rata-rata Pemda Magelang dari retribusi penarikan pajak pertambangan per tahun adalah Rp 2.765.094.142,00. Sebuah studi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi (Pentamben) Propinsi Jawa Tengah dan Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional (P4N) UGM (2000) menunjukkan kerugian yang harus ditanggung Pemda Kabupaten Magelang dari kegiatan penambangan pasir sebagaimana tersaji dalam Tabel 2. Dari data tersebut terlihat bahwa sebenarnya Pemda Magelang mengalami kerugian atas adanya kegiatan pertambangan.

Kawasan Wisata Kaliurang, Desa Hargobinangun

Aktor yang bermain di kawasan wisata adalah BKSDA DIY, Dishutbun DIY, Pemda Kabupaten Sleman, dan PD Anindya. Peran dan pendapatan mereka disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 2. Kerugian atau Biaya Langsung yang Dibayar Pemerintah di Kawasan Pertambangan Merapi di Kabupaten Magelang.

Macam Beban	Nilai (Rp)
Kerusakan jembatan	66.750.000
Kerusakan jalan	30.330.000.000

Pemeliharaan sabo dam	2.400.000.000
Penyusutan sabo dam	10.000.000.000
Kerugian lingkungan lain 10%	4.755.194.444
Jumlah	47.551.944.444

Tabel 3. Aktor dan Pendapatan di Kawasan Wisata Kaliurang di Tahun 2004

Aktor	Tanggung jawab	Rata-rata pendapatan
BKSDA DIY	Pengelolaan CA Plawangan Turgo	-
Dishutbun DIY	Pengelolaan hutan lindung dan penarikan retribusi TWA Plawangan Turgo	Rp 48.764.800,00
Pemda Kabupaten Sleman	Pengelolaan gerbang pintu masuk melalui BPKKD dan sebagian fasilitas wisata melalui Diparbud	Rp 677.571.700,00
PD Anindya	Pengelolaan sebagian fasilitas wisata*, Pengelolaan parkir, Pengelolaan air minum	Rp 1.096.669.500,00

Sumber: Dishutbun DIY, BPKKD Kab. Sleman, Diparbud Kab. Sleman, PD Anindya, diolah (2006)

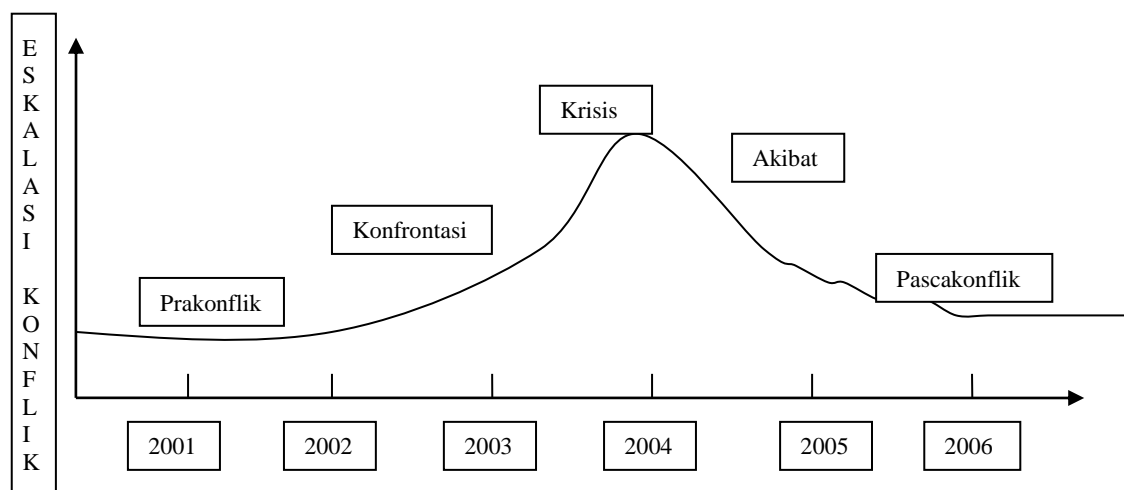
*Belum termasuk pendapatan dari persewaan kios, mainan anak, dan toilet karena ketidaklengkapan data

Pada Tabel 3 tersebut terlihat bahwa perolehan pendapatan terbanyak ada pada PD Anindya yaitu sebesar Rp 1.096.669.500,00. Sementara pendapatan paling sedikit adalah Dishutbun, yaitu Rp 48.764.800,00. Ketimpangan pendapatan ini menimbulkan kecemburuan mengingat peran Dishutbun DIY yang besar dalam pengelolaan hutan lindung. TNGM dianggap mampu mengakomodir kebutuhan akan dana pengelolaan kawasan konservasi yang terbatas (Pemda DIY dan Jateng 2002).

Reaksi terhadap penetapan TNGM di tiga kawasan studi memperlihatkan adanya penolakan di kawasan pemukiman penduduk Ngargomulyo dan penerimaan

pada kawasan tambang pasir Jurangjero, Ngargosoka dan kawasan wisata Kaliurang, Hargobinangun. Ini menunjukkan bahwa TNGM tidak diterima pada rezim organik alam, sementara rezim kapitalis alam menerima TNGM.

Analisis konflik di TNGM Reaksi pro-kontra atas terjadinya perubahan mekanisme akses dan hak sumberdaya alam semenjak penetapan TNGM memicu konflik terbuka antara Ornop-L dan Organisasi akar rumput melawan Pemerintah. Penahapan konflik pro kontra TNGM bisa terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahap-tahap Konflik Pro-Kontra TNGM

Konflik bermula dari gagasan untuk mengubah status kawasan Merapi menjadi TNGM pada tahun 2001. Semenjak itu polemik bermunculan. Tahun 2001-2003 pemerintah melakukan sosialisasi, Ornop-L dan organisasi akar rumput melakukan aksi demo menggalang dukungan massa. Puncak konflik terjadi ketika Walhi mengajukan gugatan terhadap pemerintah mendesak agar SK Menhut 134/2004 dicabut. Upaya

Walhi gagal, putusan pengadilan memenangkan Pemerintah. Selanjutnya Pemerintah meneruskan proses penetapan TNGM hingga mendirikan kantor Balai TNGM. Adanya bencana letusan gunung Merapi dan gempa bumi sejenak meredakan suasana pro-kontra. Namun bukan tidak mungkin konflik akan meningkat kembali sewaktu-waktu.

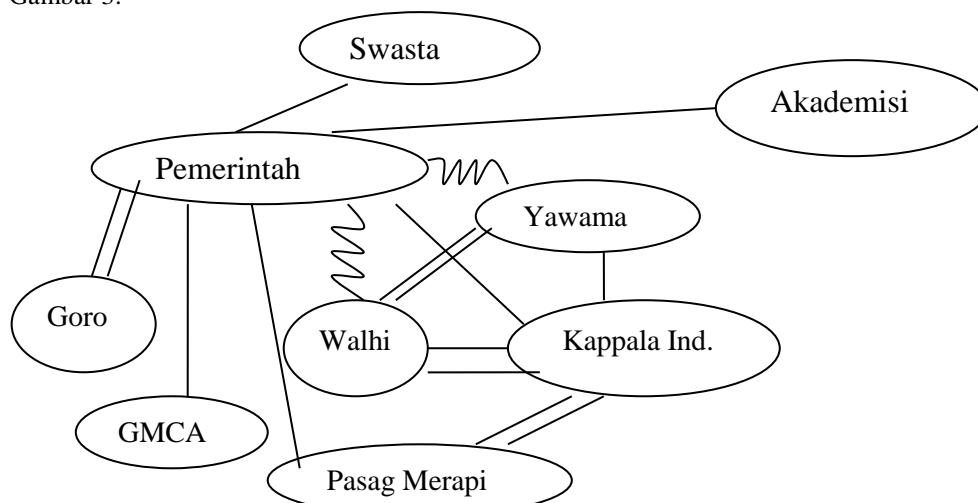
Analisis terhadap pemahaman kejadian antar aktor (Tabel 4) memperlihatkan bahwa pihak pemerintah sebenarnya tidak terlalu terganggu dengan reaksi kontra terhadap TNGM. Langkah-langkah yang

dilakukan pemerintah tidak satupun yang menunjukkan kehendak untuk menyurutkan niat penetapan TNGM.

Tabel 4. Urutan Kejadian Pro-Kontra TNGM

Kejadian menurut pandangan pemerintah	Tahun	Kejadian menurut pandangan Ornop-L
Pengelolaan kawasan Merapi mengalami masalah dana dan kelembagaan. Solusinya adalah merubah status kawasan menjadi TNGM.	2001	Mengakui perlunya konservasi kawasan Merapi tapi tidak setuju TNGM karena menganggap pemerintah tidak/belum mampu menangani permasalahan taman nasional.
1. Pemda Prop Jateng dan Pemda Prop. DIY membuat kajian pengembangan kawasan Merapi dan mengakui taman nasional sebagai fungsi konservasi yang tepat. 2. Melakukan sosialisasi TNGM	2002	1. Mempertanyakan keefektifan TNGM sebagai solusi atas permasalahan di kawasan konservasi Merapi. 2. Melakukan sosialisasi menentang gagasan TNGM bersama DPRD di 4 kabupaten: Boyolali, Klaten, Sleman, Magelang.
Mulai melakukan langkah-langkah menuju TNGM. Membuat kajian kelayakan kawasan ekosistem gunung Merapi untuk TNGM bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.	2003	Studi potensi untuk mengkaji bentuk konservasi yang tepat untuk kawasan Merapi.
Merevisi SK Menhut 70/2001 menjadi SK 48/2004 tentang tidak perlunya persetujuan DPRD untuk perubahan fungsi kawasan lintas propinsi. Mengeluarkan SK Menhut 134/2004 tentang perubahan fungsi kawasan konservasi Merapi menjadi TNGM seluas ± 6410 ha. Mengakui SK 48 terlambat disampaikan.	2004	SK Menhut 134 mengabaikan partisipasi masyarakat. Walhi, DPRD Sleman, Fak Kehutana UGM menolak penetapan TNGM. Mengadakan aksi demonstrasi bersama aliansi 26 Ornop-L di kawasan Merapi. Walhi Mengajukan gugatan agar SK Menhut 134 dicabut
1. Memenangkan gugatan Walhi 2. Membuat MOU untuk pengelolaan TNGM antar 5 Pemda: Yogyakarta, Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten 3. Melakukan pemetaan zonasi dikerjakan oleh PAU UGM 4. Melakukan penetapan tapal batas TNGM dikerjakan oleh BAPLAN	2005	1. Kalah sidang PTUN 2. Mengajukan somasi 2x, tapi gagal
Mendirikan kantor Balai TNGM di Sleman	2006	Membuat pemetaan partisipasi untuk mengkaji respon masyarakat terhadap TNGM

Pemetaan konflik pro-kontra terhadap TNGM sekaligus relasi kekuasaan antar aktor disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pemetaan Konflik Pro Kontra TNGM

Peta konflik dan relasi kekuasaan antar aktor tersebut bisa dibaca sebagai berikut: satu garis penghubung menandakan antar aktor memiliki hubungan dekat, dua garis sejajar memperlihatkan hubungan aliansi antar keduanya, sedangkan garis belok-belok memperlihatkan adanya konflik antar kedua aktor. Dalam konflik ini terlihat bahwa pemerintah memperoleh dukungan dari akademisi sebagai pemberi justifikasi ilmiah terhadap keluaran kebijakan. Peta konflik ini memperlihatkan juga bahwa meskipun antara Walhi dan Pemerintah berkonflik, namun kerjasama antara anggota Walhi dan pemerintah bisa terjalin. Demikian pula halnya dengan organisasi akar rumput (Pasag Merapi) yang merupakan aliansi Ornop-L (Kappala Indonesia) mampu terjalin kerjasama dengan pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil analisis akses memperlihatkan terdapatnya ketidakadilan akses sumberdaya alam di kawasan Merapi. Penetapan TNGM menguntungkan mereka yang tinggal di kawasan rezim kapital alam dan merugikan mereka yang tinggal di kawasan rezim alam organik.

Konflik pro-kontra TNGM bisa dikategorikan sebagai konflik struktural karena dipicu oleh turunnya kebijakan dari pemerintah untuk mengubah status kawasan konservasi di Merapi menjadi taman nasional. Konflik yang terjadi antara Ornop-L dan Pemerintah adalah konflik wacana konservasi dimana para aktor yang memiliki pengetahuan tentang konservasi bersaing untuk bisa mempengaruhi publik. Akademisi turut berperan dalam mempengaruhi perilaku aktor lain dan interaksi mereka.

Pro kontra TNGM juga disebabkan karena sosialisasi yang kurang memuaskan masyarakat dan mis komunikasi antar instansi pemerintah sendiri. Situasi dimana informasi terdistorsi adalah situasi yang rawan konflik terlebih karena diliputi dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam kondisi seperti ini aktor yang kuat adalah mereka yang memiliki informasi sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola informasi secara intelektual.

Saran

Pengelolaan TNGM sebaiknya memperhatikan mekanisme akses yang dimiliki oleh masing-masing aktor untuk memahami mengapa terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan. Di desa Ngargomulyo manajemen kolaborasi TNGM sebaiknya memperhatikan penyebab perambahan hutan dan mencari solusi, bukannya menyalahkan pelaku perambahan.

Pengelolaan TNGM hendaknya memperhatikan keberadaan organisasi akar rumput yang selama ini terpinggirkan untuk membangun rasa saling percaya masyarakat. Kerjasama dengan organisasi akar rumput yang memposisikan diri sebagai mitra kritis akan lebih

bisa diwujudkan daripada dengan Ornop-L yang memposisikan diri sebagai oposisi.

Kerjasama antar pihak yang berbeda wacana konservasi sebaiknya dilakukan dalam bentuk dialog untuk terus mengembangkan wacana konservasi.

Daftar Pustaka

- [BKSDA] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. 2003. *Rencana Pengelolaan Calon Taman Nasional Gunung Merapi*.
- [BKSDA] Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan Pusat Studi Agroekologi UGM. 2004. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024*.
- Bryant dan Bailey. 2000. *Third World Political Ecology*. New York: Routledge
- Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Tengah dan Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada. 2000. *Penataan dan Pengaturan Usaha Penambangan di Kawasan Gunung Merapi Tahun Anggaran 2000*.
- Escobar, A. 1999. *After Nature. Steps to an Antiessentialist Political Ecology*. *Current Anthropology* 40 (I). pp. 1-27.
- Fisher S, Ludin J, Williams S, Abdi DI, Smith R, Williams S. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia
- Malik I, Boedhi W, Noer F, Antoinette R. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Yones K.P., Prasetyohadi, Dadang T. [Editor]. Yayasan Kemala. Jakarta.
- Pemerintah Daerah Propinsi DIY dan Propinsi Jawa Tengah. 2002. *Rancangan Pengembangan Taman Nasional Gunung Merapi*. Yogyakarta. Maret 2002.
- Ribot JC, Peluso N. 2003. *A Theory of Access*. *Rural Sociology* 68 (2). pp. 153-181.
- Sitorus MTF. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antropologi dan Kependudukan Jurusan Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Wittmer H, Birner R. 2005. *Between Conservationism, Eco-populism and Developmentalism – Discourses in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia*. CAPRI Working Paper No.37. Washington DC: International Food Policy Research Institute.